

STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG

Gerry Katon Mahendra (1), Erni Saharuddin (2), Avininda Dewi Nindiasari (3)

^{1,2,3} Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta 082138725271

Email Korespondensi: : ernisaharuddin@unisayogya.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi. Menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang berfokus pada tiga perpustakaan desa, yaitu Perpustades Ngablak, Sedayu, dan Kadiluwih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara langsung, meskipun minim pemanfaatan teknologi digital, tetapi mampu menjangkau masyarakat dan membangun partisipasi yang cukup baik. Dalam aspek sumber daya, keterlibatan masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa berkontribusi terhadap keberlangsungan program, namun terdapat kendala pada keterbatasan SDM dan dana operasional. Dari sisi disposisi, dukungan dan komitmen pemerintah desa terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan keberlanjutan program, walaupun hal tersebut tidak merata di lokasi penelitian. Sementara itu, struktur birokrasi di ketiga Perpustades belum berjalan optimal, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan dan pengembangan program. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan struktur organisasi, regenerasi pengurus, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kata kunci: Implementasi, perpustakaan desa, inklusi sosial

Abstract: This study aims to determine the Implementation of the Social Inclusion-Based Library Transformation Program in Magelang Regency. The approach used is descriptive qualitative with interview and observation techniques. Using Edward III's policy implementation theory, which includes four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which focuses on three village libraries, namely Ngablak, Sedayu, and Kadiluwih Village Libraries. The results of the study indicate that direct communication, although minimal use of digital technology, is able to reach the community and build fairly good participation. In terms of resources, community involvement and support from the village government contribute to the sustainability of the program, but there are still obstacles in the form of limited human resources and operational funds. In terms of disposition, support and commitment from the village government have proven to be a determining factor in the success of the poor program, although this is not evenly distributed in all research locations. Meanwhile, the bureaucratic structure in the three Village Libraries has not been running optimally, which has an impact on the effectiveness of program management and development. This study recommends the importance of strengthening the organizational structure, regeneration of administrators, increasing human resource capacity, and utilizing information technology in supporting the implementation of the social inclusion-based library program.

Key words: Implementation, village library, social inclusion

Article History :

Received 12-04-2025; Revised 01-08-2025; Accepted 18-08-2025

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2019 menempati peringkat ke 111 dari 188 negara. Salah satu unsur penunjang tinggi rendahnya IPM tersebut adalah unsur pendidikan (*education*) yang di dalamnya terdapat penilaian terhadap kinerja/kesadaran membaca (*reading performance*) suatu negara (Sudjono, 2020). Selain itu, diprediksi Indonesia di tahun 2030-2040 akan mengalami bonus demografi. Penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memanfaatkan secara maksimal dari bonus demografi, ketersediaan SDM produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Pada tingkat internasional terkait permasalahan di beberapa Negara, PBB membuat Resolusi pembangunan bersama hingga tahun 2030 yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs. Di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 capaian yang terukur dan disepakati oleh 193 negara. Dari 17 capaian itu sebagian besar merupakan program yang sedang digaungkan oleh Perpustakaan di Seluruh Indonesia. Dalam konteks inilah program unggulan perpustakaan nasional berupa transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi sangat penting. Program tersebut disahkan oleh Kementerian PPN/Bapenas pada tahun 2018. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia yang hal ini sejalan dengan tujuan SDGs.

Program Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. perpustakaan menjadi tempat berlatih dan mengembangkan diri, menjadi tempat berinteraksi dengan komunitas sosial, serta *working space* tumbuhnya inovasi baru *entrepreneurship*.

Pada tahun 2019, program transformasi berbasis inklusi sosial baru dilaksanakan di 300 desa di 59 kabupaten dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan total 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia (Sumber: perpusnas.go.id). Kabupaten Magelang sebagai salah satu penerima manfaat program sejak tahun 2019, sejumlah perpustakaan desa di Kabupaten Magelang sebagai penerima manfaat program meliputi perpustakaan di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Perpustakaan Desa Sedayu, Kecamatan Muntinan, Perpustakaan Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Perpustakaan Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Perpustakaan Ngablak, Kecamatan Ngablak, dan Perpustakaan Giyanti, Kecamatan Candimulyo.

Perpusnas RI juga terus mengapresiasi perpustakaan yang dinilai berhasil menerapkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Magelang mendapat penghargaan dari Perpusnas RI yaitu Anugrah Jasa Dharma Pustaloka 2019 dan 2020. Kabupaten Magelang dinilai terbaik dalam implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan Muda Bhakti Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung juga berhasil meraih penghargaan sebagai perpustakaan desa terbaik dalam implementasi program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa desa penerima program ini tentu perlu dikaji lebih jauh terkait pelaksanaannya di lapangan, strategi apa yang mereka lakukan untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain itu, perpustakaan desa yang meraih penghargaan tingkat nasional sangat menarik untuk dikaji lebih dalam sehingga peneliti nantinya akan melakukan komparasi pengembangan beberapa perpustakaan desa yang tujuannya untuk mengetahui faktor keberhasilan dan menyusun model pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sebuah tempat yang senantiasa menyediakan berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa melihat strata sosial seseorang. Konsep ini digaungkan oleh IFLA dalam dokumen *“Access and Opportunity for All”*, yang diselenggarakan untuk mendukung Sustainability Development Goals (SDGs) (International Federation of Library Associations and Institutions, 2018).

Pada standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan RI pada tahun 2011 tertulis bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat (Zen & Wuryani, 2011). Lebih lanjut, perpustakaan umum memberikan layanan tanpa memandang ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, difabel, status sosial, dan ekonomi (IFLA, 2010). IFLA & UNESCO (2012) menjelaskan aspek multikultural yaitu kesetaraan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dibalik perbedaan budaya yang ada pada setiap masyarakatnya.

Komunitas perpustakaan terdiri dari para pengguna yang memiliki perbedaan status sosial, pendidikan, mentalitas, oleh karena itu aspirasi perpustakaan umum untuk dapat diakses oleh setiap anggota komunitas (Peceliunait, 2017). Keterlibatan masyarakat siapa pun itu bagi yang berpendidikan rendah ataupun tinggi serta dari bermacam tingkat status merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh pengelola perpustakaan umum. Oleh karena itu, perpustakaan umum memiliki peran untuk memfasilitasi masyarakatnya sebagai ruang pertemuan antarmasyarakat (Aabo et al., 2010).

Peran informasional berarti bahwa perpustakaan dapat memastikan akses ke literatur dan informasi berkualitas tinggi (misalnya buku, majalah, akses Internet) dan memberikan layanan kepada semua kelompok sosial (Appleton, Hall, Duff & Raeside, 2018; Davey, 2013). Peran pendidikan-budaya memiliki arti bahwa perpustakaan dapat menawarkan peluang budaya (Izzivi prihodnosti, 2020) waktu luang (Kijauskaite & Alebaite, 2016, Wyatt, Mcquire & Butt, 2018, Yilmaz & Cevher, 2015), yang saat ini dikaitkan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Dengan menyediakan layanan pembelajaran nonformal perpustakaan melatih pengguna dalam literasi informasi dan ekonomi, kreativitas, bahasa asing, dll. Pelatihan ini juga mengembangkan kompetensi umum yang membantu beradaptasi dengan pasar kerja dan kehidupan sosial

B. Konsep Inklusi Sosial

Konsep inklusi sosial datang dari suatu istilah yang disebut dengan eksklusi sosial yang berarti di mana kondisi suatu masyarakat yang merasa dirinya berbeda dengan masyarakat lainnya. Lebih lanjut, Power & Wilson (dalam Reza Mahdi, 2020) menjelaskan hal tersebut adalah mengenai ketidakmampuan dari suatu kelompok ataupun individu untuk menjaga diri mereka agar bisa berinteraksi dengan masyarakat umum. Hal tersebut yang membuat konsep baru muncul berupa inklusi sosial. Konsep ini membangun masyarakat agar semakin terbuka dengan masyarakat lainnya, meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Cara ini dilakukan melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya, dan rasa hormat bagi mereka (Leonir, 1974 (dalam Warsilah, 2015; (UNDESA, 2016)

Menurut klasifikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) ada enam kelompok masyarakat yang terkena eksklusi sosial. Keenam kelompok tersebut yaitu korban diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasis agama, korban pelanggaran HAM berat; waria, masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, disabilitas dan anak dan remaja rentan (Azyumardi Azra, 2016). Lebih lanjut, eksklusi sosial bisa datang dari berbagai faktor, misalnya warna kulit yang berbeda, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi seseorang atau masyarakat, yang efeknya mencegah mereka untuk

berpartisipasi penuh dalam masyarakat (Charity Commission, 2011; Noor, 2019).

C. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Inklusi sosial di bidang perpustakaan mulai diwacanakan pada tahun 1999 melalui dokumen *Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England October 1999*. kunci dalam pengembangan inklusi sosial di bidang perpustakaan, yaitu:

1. Perlunya inklusi sosial di perpustakaan umum,
2. Kontek inklusi social,
3. Identifikasi dan hambatan keterlibatan masyarakat,
4. Kebijakan inklusi social (Khairunisa, 2020)

Paul Sturges dalam (Mallawa, 2019) mendefinisikan perpustakaan berbasis inklusi social sebagai perpustakaan yang bisa memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan mempertimbangkan keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya serta Hak Asasi Manusia.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Transformasi tersebut dapat diwujudkan dalam 4 peran, yaitu: (1) Pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan (2) Berdaya guna bagi masyarakat (3) Wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat (4) Memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. (Malawa; 2019).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bapenas mulai tahun 2018 telah menetapkan Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tujuan Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk: (1) Meningkatkan literasi berbasis TIK, (2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan (3) Memperkuat peran dan fungsi perpustakaan dan menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

D. Implementasi Kebijakan

Sabatier (1986, dalam Akib Haedar, 2010) Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Ada beberapa model implementasi menurut para ahli, diantaranya:

- a. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier atau disebut Kerangka Analisis Implementasi yang meliputi tiga variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan; karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan
- b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III, menurut Edward Kebijakan dapat berjalan efektif apabila terdapat empat isu yang perlu diperhatikan, yaitu Komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur birokrasi. (T, Saputra. 2018)
- c. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn atau yang sering disebut *A Model of the Policy Implementation*. Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable, yaitu:
 1. Standar dan tujuan kebijakan
 2. Sumberdaya
 3. Karakteristik agen pelaksana

4. Sikap atau kecenderungan pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif secara umum adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang yang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah rangkaian kalimat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kata per kata hingga mendapatkan kesimpulan secara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan tentang Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan menggunakan teori Implementasi Edwards III sesuai dengan unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan. Komunikasi pada organisasi yang dilakukan dengan menjelaskan apa saja sasaran dan maksud kebijakan secara rinci sehingga dalam penerapan dan rencana suatu kebijakan dapat dioptimalkan dengan baik. Setiap kebijakan publik tentunya akan ada pihak yang tidak sejalan dan perlu diantisipasi atau pihak yang resisten terhadap kebijakan yang dipilih. Dengan demikian unsur komunikasi diharapkan dapat membentuk pemahaman yang sama.

Edward III dalam Agustino (2006:157-158) menegaskan bahwa: "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan informasi dan konsistensi informasi akan mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Ngablak ditemukan bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan yang telah tersusun ada 15 orang yang melibatkan ibu-ibu PKK, pemuda dan elemen masyarakat. Kepengurusan di perpustakaan Ngablak ada yang melibatkan dari desa karena dalam program ini sudah menjadi prioritas dari desa. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan aktivitas di Perpustakaan Ngablak, sosialisasi dilakukan langsung oleh pak Muhadi, beliau salah satu tokoh masyarakat dan juga pendiri Perpustakaan Ngablak. Sosialisasi saat ini disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut, dan belum memanfaatkan media sosial dikarenakan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses. Disisi lain, penyampaian informasi yang dilakukan dianggap berhasil karena berbagai aktivitas perpustakaan inklusi diketahui oleh masyarakat dibuktikan dengan partisipasi pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di perpustakaan, kemudian keikutsertaan masyarakat untuk memberikan dukungan dalam bentuk satu pohon salak yang digunakan untuk operasional perpustakaan.

Kemudian, Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di PERPUSDES Sedayu, Muntilan ditemukan bahwa tujuan berdirinya agar masyarakat bisa membaca buku, meminjam buku

serta mengembalikan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat selain itu gedung yang tersedia dapat digunakan untuk kegiatan anak-anak seperti bimbel dan pelatihan bisa juga digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan di PERPUSDES Magelang terdapat kendala karena sampai saat ini dalam sistem pengelolanya hanya melibatkan 2 orang untuk struktur organisasinya sudah ada namun kepengurusan yang sudah ada tidak berjalan dengan efektif.

Penyampaian informasi dari PERPUDES Sedayu, Muntilan berkaitan dengan lahirnya konsep perpustakaan inklusi sudah diketahui oleh pihak pengelola perpustakaan sejak tahun 2019. Perpustakaan Sedayu bukan hanya tempat membaca, meminjam buku saja tapi juga tempat untuk berkegiatan yang bisa bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan di Perpustakaan desa pemerintah daerah dalam hal ini Perpustakaan Daerah juga sudah mengundang dalam kegiatan BIMTEK. Konsep perpustakaan inklusi dapat diterapkan oleh pengurus karena pemerintah daerah yang senantiasa memberikan dukungan dengan beberapa kegiatan. Hasilnya bahwa saat ini Perpustakaan Sedayu, Muntilan bukan hanya untuk tempat membaca buku atau meminjam buku saja, tapi juga ada kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak.

Dan berdasarkan Perpustakaan Kadiluwih ditemukan bahwa Perpustakaan Kadiluwih sudah berbasis inklusi hal ini dikarenakan adanya penyampaian informasi dan pendampingan dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Informasi yang jelas dan konsisten ini membuat pengelola perpustakaan dapat memahami maksud dari perpustakaan desa berbasis inklusi. Pendampingan yang dilakukan pun rutin baik secara langsung maupun melalui media komunikasi whatsapp.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya finansial menentukan keterlaksanaannya suatu kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat.

Ditemukan fakta bahwa dalam pengembangan perpustakaan melibatkan berbagai unsur terdiri dari unsur desa, ibu-ibu PKK, pemuda, dan tokoh masyarakat, mereka merangkul dalam proses pengembangan perpustakaan. Untuk pelaksanaan tiap harinya di perpustakaan terdapat kendala, dari sisi jumlah petugas berjumlah 2 orang namun yang bertugas menjaga juga punya kesibukan lain di luar karena status bekerja di Jogja. Upaya yang dilakukan adalah pihak pengelola menggandeng pemuda sebagai volunteer juga patut diapresiasi, namun kedepan sangat perlu dilakukan regenerasi pengurus.

Dari sisi sarana dan prasarana perpustakaan Ngablak, dari hasil pengamatan peneliti sudah memadai, perpustakaan Ngablak memiliki Gedung 2 lantai, lantai 1 dilengkapi dengan berbagai macam buku-buku, dan meja untuk tamu dan petugas, di lantai 2 dilengkapi dengan komputer dan alat musik yang biasa digunakan oleh masyarakat, lantai 2 seringkali digunakan untuk aktivitas pelatihan baik kegiatan dari desa maupun kegiatan dari Ibu-ibu PKK. Adapun dari sisi sumber daya anggaran, sumber daya untuk memberikan insentif ke petugas perpustakaan diambilkan dari dana hibah tanah desa. Dengan demikian kepala desa mencari alternatif lain dengan cara menghibahkan tanah desa untuk penanaman salak madu yang pendapatannya digunakan untuk pendanaan dalam pengelolaan perpustakaan Ngablak.

Beda halnya dengan PERPUSDES Perpudes Kadiluwih, yang mana menemukan fakta bahwa sumber daya manusia masih minim, keberadaan Perpudes Kadiluwih yang berada dalam lingkungan kantor kalurahan sehingga dalam operasional saat ini dibantu dari pegawai kalurahan berjumlah 2 orang, dengan jumlah SDM 2 orang dirasa masih sangat kurang dan mereka sudah berencana mengajak mahasiswa yang ada di desa Kadiluwih untuk sama-sama bisa menghidupkan perpustakaan desa tsb. Kapasitas SDM yang ada saat ini sudah dikatakan cukup memadai karena keduanya telah mengikuti Bimtek berkaitan perpustakaan inklusi.

Dari sisi sarana dan prasarana, dari hasil pengamatan peneliti ruang perpustakaan yang cukup luas terdapat di lantai 2, dengan sarana terdiri dari TV, meja, meja untuk anak-anak, laptop, printer dan buku yang berjumlah 150, walaupun secara jumlah buku masih lebih kecil dibandingkan perpustakaan Ngablak, namun jika dilihat bahwa perpustakaan ini baru dibentuk sudah menunjukkan progress yang baik apalagi sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan untuk anak-anak di kalurahan.

Selanjutnya berkaitan dengan sumberdaya di perpustakaan Sedayu. Hasil pengamatan peneliti di lokasi, dari sisi fasilitas Gedung sudah memadai, ruangan representative untuk belajar dan melakukan aktivitas pengembangan diri bagi masyarakat. Sumber bacaan juga cukup memadai hanya saja Sumberdaya manusia tidak memadai untuk mengelola perpustakaan ini. dan juga kurangnya anggaran untuk menjalankan aktivitas di Perpustakaan Sedayu. Sumber daya dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang dilihat dari segi kualitas finansial, fasilitas dan informasi. Adapun kendala yang ada yaitu mengenai minimnya dana anggaran insentif, pengelola perpustakaan yang mendapatkan insentif hanya yang menjaga perpustakaan sesuai jam operasionalnya.

3. Disposisi

Dengan adanya disposisi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi merupakan salah satu teknik yang dapat mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika dilihat dari 3 Perpustakaan yang ada maka dapat dilihat bahwa saat ini Disposisi merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan Perpustakaan. Disposisi ini dimulai dari Pemerintah di level kabupaten hingga ke level pemerintah Desa.

Pada perpustakaan Ngablak, dukungan dari Pemerintah desa membuat perpustakaan Desa bisa terus eksis menjalankan aktivitas-aktivitas, support pemerintah desa mulai dari kegiatan Musyawarah Desa para pengelola perpustakaan itu ikut dilibatkan untuk menyampaikan rencana-rencana programnya, meskipun terjadi pergantian kepala Desa namun support pemerintah selalu konsisten. Hal yang sama juga nampak di Perpustakaan Desa Kadiluwih, pemerintah desa memberikan dukungan untuk jalannya kegiatan di perpustakaan, termasuk juga dukungan bangunan perpustakaan yang berada di lingkungan pemerintah desa.

Sementara itu, di Perpustakaan Sedayu, peneliti menemukan bahwa dukungan pemerintah desa sebelumnya terlihat dari bangunan perpustakaan yang berada di tanah kas Desa. Awal mula lahirnya perpustakaan ini oleh kepala desa sebelumnya mendapatkan support yang luar biasa hingga kegiatan-kegiatan di Perpustakaan berjalan aktif. Namun, saat ini Perpustakaan Sedayu kurang mendapat dukungan terbukti beberapa kegiatan yang direncanakan tidak mendapat respon positif dari pemerintah desa setempat. Ke tiga PERPUSDES tersebut, support pemerintah desa sangat dibutuhkan demi berjalannya perpustakaan

berbasis inklusi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Salah satu PIC dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, bahwa pernyataan komitmen dari Desa ini sangat diperlukan demi kelangsungan dan keberlanjutan program.

4. Struktur Birokrasi

Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta, institusi Pendidikan. Birokrasi merupakan institusi yang paling sering menjadi pelaksana kegiatan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Perpustakaan Ngablak telah ditemukan fakta bahwa struktur birokrasi yang ada di perpustakaan Ngablak dalam pelaksanaan program ini belum optimal, karena anggota pengurus sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing yang menjadikan pengelolaan dalam perpustakaan Ngablak kurang optimal. Tidak adanya struktur birokrasi khusus atau tim pelaksana khusus dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan perpustakaan. Akan tetapi perpustakaan Ngablak ini sudah mempunyai standar operating procedures (SOP) aturan-aturan peminjaman buku. Masyarakat dalam meminjam buku tertib pengembaliannya karena jika tidak sesuai dengan batas ketentuan peminjaman dikenakan denda sesuai dengan aturannya, untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan harus meninggalkan nomor telepon agar perpustakaan mudah untuk konfirmasi jika peminjam lupa untuk mengembalikan. Pentingnya peran standar operasional prosedur dalam menjalankan program, khususnya untuk membantu proses perkembangan dan kemajuan suatu program.

Kemudian peneliti melakukan penelitian di perpustakaan Kadiluwih sebagai pembandingan dengan perpustakaan yang lainnya. Dalam pengelolaan melibatkan tokoh masyarakat dan ibu-ibu PKK untuk struktur perpustakaan Kadiluwih sudah ada rencananya mau ditambahkan lagi namun belum terlaksana sampai sekarang. Perpustakaan Kadiluwih merencanakan untuk bisa bekerja sama dengan mahasiswa namun setelah di pertimbangkan waktu mahasiswa cuman terbatas karena mereka masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Rencana kedepannya perpustakaan Kadiluwih agar struktur birokrasinya berjalan dalam pengelolaan dan pengembangan akan membuat komunitas yang melibatkan mahasiswa yang ada di lingkungan desa tetapi sampai sekarang belum terjadwal. Akan tetapi perpustakaan Kadiluwih terdapat kendala dalam pengelolaan karena yang terlibat dalam kepengurusan mempunyai kesibukan masing-masing kemudian untuk alat yang digunakan untuk mendata juga eror. Belum adanya struktur birokrasi khusus ternyata tidak hanya terjadi di perpustakaan Kadiluwih saja namun di beberapa perpustakaan juga belum adanya struktur birokrasi yang optimal.

Selanjutnya penelitian dilakukan di perpustakaan Sedayu untuk melihat perbandingannya dengan perpustakaan yang sudah dilakukan. Di perpustakaan Sedayu ditemukannya fakta bahwa kepengurusannya sudah dibentuk namun tidak berjalan dengan baik, karena pengelolanya mempunyai kesibukan masing-masing ada yang menjadi ibu rumah tangga, mempunyai pekerjaan, dan mengurus anak sama hal nya dengan perpustakaan Ngablak. Pentingnya struktur birokrasi dalam menjalankan suatu program agar ada kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap pelaksana guna mempermudah pegawai perpustakaan dalam melaksanakan pekerjaan, kegiatan, dan tujuan dari perpustakaan dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik begitu juga dengan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan akan lebih mudah dan optimal

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh empat komponen utama dalam teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketiga perpustakaan desa yang diteliti adalah perpustakaan desa Ngablak, Sedayu, dan Kadiluwih menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Perpustakaan Desa Ngablak mampu mengimplementasikan program dengan baik berkat komunikasi yang lancar, dukungan pemerintah desa, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sebaliknya, Perpustakaan Desa Sedayu mengalami kendala dalam pelaksanaan program karena keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya dukungan dari pemerintah setempat. Sementara itu, Perpustakaan Desa Kadiluwih masih dalam proses pengembangan, namun sudah mulai menunjukkan potensi melalui kolaborasi, terutama dengan kalangan akademisi. Secara keseluruhan, keberhasilan program sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah desa, pengelola perpustakaan, dan masyarakat. Kompetensi sumber daya manusia, pelatihan yang berkesinambungan, serta struktur organisasi yang jelas menjadi faktor penentu dalam mendukung keberlanjutan program. Untuk itu, diperlukan upaya kolektif guna memastikan program ini terus berjalan dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

SARAN

1. Pemerintah desa bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang perlu menyediakan pelatihan rutin dalam manajemen perpustakaan dan literasi digital
2. Pemerintah desa lebih aktif dan proaktif dalam mendukung kebijakan dan kegiatan perpustakaan desa sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di tingkat lokal
3. Regenerasi pengelola perpustakaan perlu dirancang melalui perekrutan relawan muda, atau pemuda karang taruna untuk mendukung keberlanjutan Perpustades
4. Perlunya menjalin kolaborasi dengan mitra seperti Perguruan Tinggi untuk mendukung terlaksananya perpustakaan desa inklusi.

REFERENSI

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1, No.1
- Appleton, L., Hall, H., Duff, S. A., & Raeside, R. 2018. UK Public Library Roles and Value: A Focus Group Analysis. *Journal of Librarianship and Information Science*, 50(3), 275–283. doi.org/10.1177/0961000618769987
- Auliawati, Rani Rachman, Dadang Sugiana, H. Rohanda. 2019. Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019 “Communication and Information Beyond Boundaries”
- Azyumardi Azra. 2016. Inklusi Sosial; Enam Kelompok. Retrieved May 4, 2019, from Republika Online website: <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/09/21/oduyvf319-inklusi-sosial-enam-kelompok>
- Davey, A. 2013. The Library of the Future: A Response to Envisioning the Library of the Future^[1] by Arts Council. Retrieved from https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/The_library_of_the_future_May_2013.pdf.
- Deni Prasetyo, Wahyu., & Utami. Dian. 2020. Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: Sebuah

Konsep Transformasi Berbasis Inklusi Sosial. Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) Vol. 5 No. 2 (2020): 293-29

https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/ifla-unesco-multicultural-library-manifesto_implementation-kit_2012-12.pdf

IFLA, & UNESCO. 2012. IFLA/UNESCO multicultural library manifesto- implementation kit. December, 1–14.

IFLA. 2010. The mission and purposes of the public library. In C. Koontz & B. Gubbin (Eds.), IFLA Public library service guidelines (pp. 1–20). International Federation of Library Association. <https://doi.org/10.1515/9783110232271.1>

International Federation of Library and Information Associations & Institutions. (2016). IFLA/UNESCO public library manifesto 1994. IFLA Webpage. <https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994>

International Federation of Library Associations and Institutions. 2018. Access and opportunity for all (p. 25 hlm.). p. 25 hlm. Retrieved from <https://www.ifla.org/publications/node/10546> [17/11/2020]

Izzivi prihodnosti. 2020. Challenges of the Future, Članek Artikel Mayor. Nomor 2, hlm. 79-101.

Khairunisa. 2020. Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literet (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi). Skripsi Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora

Mahdi, Reza. 2020. Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa dan Bagaimana Penerapannya ? (sebuah Kajian Literatur). FIHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. 15, No.2, ISSN 1978-9637 E-ISSN 2745-6390

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Depok : UI-Press

Noor, M. U. 2019. Aplikasi layanan informasi berbasis internet untuk menumbuhkan inklusi sosial di perpustakaan daerah. Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 4(1), 84–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30829/jipi.v4i1.4122>

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharyanto, Mallawa. 2019. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Retrieved June 10, 2019, from www.kompasiana.com Website: 710979acebe13c2f5af5c9/tranformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi- sosial?page=all

Transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial-dan sdgs) Sumber:<https://dipersip.riau.go.id/post/transformatasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial-dan-sdgs>

Undang - Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 2007. <https://www.perpusnas.go.id/law-detail.php?lang=id&id=170920114322Ir9g6HhRuc>

UNDESA. 2016. Identifying social inclusion and exclusion. In Leaving no one behind: imperative on

inclusive development (pp. 17–31). <https://doi.org/10.18356/5890648c-en>

- Usman Noor, Muhammad. 2019. Aplikasi Layanan Informasi Berbasis Internet untuk Menumbuhkan Inklusi Sosial di Perpustakaan Daerah. *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* Vol. 4 No. 1 Tahun 2019 ISSN (online): 2528-021X
- Utami, Dian., dan Wahyu Deni P. 2019. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial PEMBANGUNAN Sosial-Ekonomi Masyarakat. *VISI PUSTAKA* Vol. 21, No. 1.
- Utami. Dian., & Deni Prasetyo, Wahyu. 2019. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Pembangunan Sosial-Ekonomi Masyarakat. *VISI PUSTAKA* Vol. 21, No. 1, April 201
- Warsilah, H. 2015. Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 207–232. <https://doi.org/10.14203/JMB.V17I2.283>
- Wyatt, D., Mcquire, S., & Butt, D. 2018. Libraries as Redistributive Technology: From Capacity to Culture in Queensland's Public Library Network. *New media & society*, 20(8), 2934–2953. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1461444817738235>.
- Yılmaz, B., & Cevher, N. 2015. Future of Public Libraries: Opinions of Public Librarians in Turkey. *International Federation of Library Associations and Institutions*, 41(4), 336–352. doi: 10.1177/0340035215608861
- Zen, Z., & Wuryani, I. 2011. Standar nasional perpustakaan kabupaten/kota. In *Standar Nasional Perpustakaan (SNP)*